

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 13
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 29 November 2021
Waktu : 13.45 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Membahas:
1. Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022; dan
2. Melanjutkan Rapat tanggal 22 November 2021.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 35 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari sekaligus Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

5. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) beserta jajarannya;
11. Drs. Sayid Muhadhar, M.Si. (Kuasa Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
12. Ir. S.P.M. Budi Susanti, M.Sc. (Kuasa Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, membahas Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan melanjutkan Rapat tanggal 22 November 2021, dibuka pukul 13.45 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Realisasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2021 per tanggal 25 November 2021 sebesar 81,15%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar 97,41%, terutama untuk kegiatan berbasis masyarakat.

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk melakukan revisi lokasi target pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kerja, untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai prioritas dan kondisi kawasan konservasi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengupayakan penambahan pagu anggaran pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2022 yang akan digunakan untuk penambahan pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kerja untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai prioritas kondisi kawasan konservasi.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk mempertahankan status kawasan konservasi Cagar Alam Mutis di Pulau Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan agar dapat mengalokasikan minimal sebesar 40% dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Kehutanan sebagai sumber pendanaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terbaru;
 - a. Data nama-nama perusahaan perkebunan di dalam kawasan hutan yang belum mendapatkan izin pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan.
 - b. Data nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rapat Dengar Pendapat ini.

6. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam melaksanakan kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui peringatan tegas bahkan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terhadap Perusahaan Pemegang IPPKH yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

Kepala Badan Restorasi
Gambut dan Mangrove,

Ttd.

Ir. Hartono, M.Sc.